

Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam
Studi Kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura
Aid Distribution for Natural Disaster Victims
A Case Study on Natural Disaster Victims Rehabilitation in Jayapura
Municipality

Akhmad Purnama dan Murdiyanto

Peneliti Muda Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Badiklit Kesos
 Kementerian Sosial RI Jl. Kesejahteraan Sosial Nitipuran No 1 Yogyakarta Telp (0274) 377265 Fax (0274) 373530
 Email: purnamasribit@gmail.com.

Diterima 27 Maret 2013, disetujui 7 Mei 2013.

Abstract

Appropriate natural disaster victims aid distribution is an effort to reduce more victims, the problem of aid distribution are so many refugees camps and coordination among command posts. In an effort to know aid distribution, especially in Jayapura Municipality, this research is done. The research question is how aid distribution for natural disaster victims implemented and what are the supporting and handicap factor in this distribution? The answer is the goal of the research. The research location is determined purposively based on its most natural disaster happening frequency, sort of earthquake, flood, landslide, and tsunami. Information resources (informant) taken from distribution apparatus, victims, and people who know directly on natural disaster. Informants are chosen purposively with the 4 consideration that those know well about disaster in their place and having formal and informal competency in the case. Data are gathered through interview, observation, documentary analysis, and focus group discussion. Data are analysed through qualitative-descriptive technique. The research finds that the implementation of natural disaster aid distribution is done swiftly, because of many supports from natural disaster prevention, social, health, military district, police district, ready disaster youth, and volunteers in under district, district, municipality, and province level that are implemented well and solidly. The handicap factors are the unadequate of land and water transportation devices that make the distribution arriving late. Aid distribution mostly fulfilled, such as health services, home and environmental rehabilitation, working and bussines rehabilitation. One that is unfulfilled yet is the living resources of fishermen, such as boat for fishing as dailly lives resouces. It is recommended that transportation devices should be completed both for land and water needs, so that rehabilitation program can be fully realized for the victims that mostly fishermen to activate their work to fulfilled their daily lives needs.

Keywords: Aid Distribution-Natural Disaster-Victims

Abstrak

Penyaluran bantuan korban bencana alam yang tepat merupakan usaha untuk mengurangi korban yang lebih banyak, permasalahan penyaluran bantuan di antaranya adalah banyaknya titik pengungsi dan masih kurangnya koordinasi antarposko. Dalam upaya untuk mengetahui penyaluran bantuan korban bencana alam, khususnya di Kota Jayapura, perlu dilakukan penelitian ini. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran bantuan korban bencana alam dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam? Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan tingkat keseringan terjadinya bencana alam, baik gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun tsunami. Sumber informasi diambilkan dari orang (informan) yang mengetahui dan menjadi pelaku langsung distribusi bantuan, serta dari korban langsung bencana alam. Pemilihan informan ditentukan secara *purposive*, dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang mengetahui kejadian bencana alam dan memiliki kompetensi, baik secara formal maupun informal dalam penanganan bencana alam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui panduan wawancara, observasi, telaah dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan korban bencana alam dapat berjalan dengan lancar, berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah terjalin cukup solid, baik pihak BPBD provinsi maupun kota, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan Kota, kodim, kepolisian, Tagana, distrik, kelurahan, maupun sukarelawan. Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan bantuan kebutuhan korban bencana alam adalah terbatasnya alat transportasi (darat dan air), sehingga seringkali pemberian bantuan mengalami keterlambatan sampai di daerah korban bencana. Penyaluran bantuan korban bencana alam sebagian besar sudah dapat terpenuhi, seperti kebutuhan hidup korban (tanggap darurat), pelayanan kesehatan, rehabilitasi tempat tinggal, rehabilitasi lingkungan, dan rehabilitasi kerja dan usaha, walaupun ada sebagian kecil yang belum dapat terealisasi karena keterbatasan dana bantuan, seperti kapal penangkap ikan yang biasanya dipakai sebagai sarana memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan

keluarga sehari-hari. Disarankan agar ketersediaan transportasi dapat tercukupi, sehingga bantuan dapat cepat sampai korban bencana. Di samping itu, penyaluran bantuan korban yang berupa rehabilitasi kerja dan usaha secepatnya dapat terealisasi, mengingat bahwa peralatan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali mata pencaharian mereka sebagai nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata kunci: Penyaluran Bantuan-Bencana Alam-Korban

A. Bencana Alam dan Penanganan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkategori rawan bencana, karena secara geologis terletak di antara lempeng Asia, Pasifik, Australia, serta terletak di cincin api gunung berapi yang masih aktif sebanyak 129 buah. Di samping itu, terdapat 157 dari 497 kabupaten/kota di Indonesia memiliki kerawanan tinggi diterjang tsunami. kabupaten/kota dengan kerawanan tingkat tsunami itu terletak di Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa dan Nusa Tenggara, Pantai Timur dan Utara Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, serta Pantai Utara dan Barat Papua (Kompas 2 November 2010). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik geografis beragam baik secara tatanan tektonik, dinamika meteorologis dan klimatologis merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Selain itu, Indonesia dilalui oleh dua jalur gunung api dunia, yaitu: sirkum pasifik (*Pacific Ring of Fire*) dan sirkum mediterania yang melintasi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara hingga Sulawesi Utara. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), diketahui bahwa 188 kabupaten/kota di Indonesia beresiko terkena tsunami (Kompas, Jumat 20 April 2012). Beberapa kejadian bencana alam terjadi di Indonesia seperti gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2009, bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut tahun 2010, erupsi gunung api di Ternate tahun 2010, erupsi gunung api di Kabupaten Sleman Provinsi DIY tahun 2010, serta tsunami yang terjadi di Jayapura tahun 2011, merupakan bukti empiris bahwa wilayah Indonesia rawan bencana.

Bencana alam menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian pada kehidupan

manusia baik dari segi moril, materiil, dan sosial yang melampaui batas kemampuan seseorang dan atau masyarakat untuk mengatasi dengan sumberdaya yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam kondisi yang demikian, maka ketersediaan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam menjadi langkah yang cukup strategis untuk dilakukan. Berbicara tentang penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam tidak terlepas dari masalah regulasi dan kewenangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pasal 48 Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 huruf c mengamanatkan penyelenggaraan penanganan bencana, antara lain ditujukan untuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Selaras dengan ketentuan tersebut, Undang-undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 point 9 menyebutkan, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Guncangan dan kerentanan sosial yang dimaksud adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba, sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Rencana Nasional (Renas) penanggulangan bencana tahun 2010-2014 menyebutkan, bahwa Kementerian Sosial adalah instansi utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, *shelter*, dan psikososial. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi logis terhadap setiap kebijakan penanganan bencana yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dalam struktur tatanan birokrasi, setiap kebijakan penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengacu pada kebijakan Kementerian Sosial, demikian halnya dalam penyaluran bantuan sosial bencana alam. Dalam hal bantuan sosial bagi korban bencana alam, agar tujuan penyaluran bantuan sosial tercapai secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan

kebutuhan hidup korban, prosedur kegiatan yang dilakukan akan merupakan sistem jaringan kerja yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat dan *stakeholders*, antara *stakeholders* dengan masyarakat, serta antar komponen sebagai sub sistem dalam sistem jaringan yang lebih luas.

Permasalahan dari penyaluran bantuan diantaranya banyaknya titik pengungsi, dan kurang koordinasi antarposko. Berbagai kasus tersebut menjadi bukti empiris dari belum optimalnya pelaksanaan sistem jaringan dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam. Permasalahan terhadap lemahnya tata kelola penyaluran bantuan bagi korban bencana alam, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah penyaluran bantuan korban bencana alam? Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam?. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyaluran bantuan korban bencana alam, mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penyaluran bantuan sosial bencana alam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Sosial, pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten dalam meningkatkan penyaluran bantuan bagi para korban bencana alam.

B. Konsep Manajemen Penanggulangan Bencana

Bencana alam yang terjadi secara tidak menentu membutuhkan beberapa penanggulangan dalam mengurangi resiko akibat bencana. Penanggulangan bencana dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Pra Bencana: Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap ini adalah dalam situasi tidak ada atau tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

a. Kesiapsiagaan (*preparedness*): adalah upaya yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Randolph Kent (1994), kesiapan bencana mencakup “peramalan dan pengambilan keputusan berbagai tindakan pencegahan sebelum munculnya ancaman. Kesiapan meliputi pengetahuan tentang gejala munculnya bencana, gejala awal bencana, pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap sistem peringatan dini, rencana evakuasi atau tindakan lain yang harus diambil selama periode waspada untuk meminimalisir kematian dan kerusakan fisik yang mungkin terjadi. Selain itu, meliputi pendidikan dan pelatihan kepada penduduk, petugas tim khusus, pengambil kebijakan, standar baku penanganan bencana, pengamanan suplai, dan penggunaan dana. Kesiapan bencana bertujuan untuk meminimalisir kerugian melalui berbagai tindakan yang cepat, tepat, dan efektif. Terdapat sembilan butir kerangka kerja persiapan bencana (Randolph Kent, 1994 dalam Enok), yaitu pengkajian kerentanan, perencanaan, kerangka kerja institusional, sistem Informasi, basis sumber daya, sistem peringatan dini, mekanisme respons pelatihan, pendidikan umum, dan gladi.

Dalam kesiapan bencana, koordinasi antar dan intra institusi sangat penting baik secara horisontal maupun vertikal “Tidak ada acara yang baku untuk memastikan koordinasi yang efektif”. Setiap rencana sangat tergantung pada berbagai tradisi dan struktur pemerintah dari setiap negara, akan tetapi suatu rencana buruk jika tidak ada koordinasi (Randolph Kent, 1994: 23). Namun demikian dapat dipastikan, bahwa semakin pendek jalur birokrasi dan spesifik tugas biro, maka akan semakin efektif dalam penanganan bencana. Dalam mengembangkan biro kebencanaan, harus diperhatikan tanggung jawab yang mapan dan sesuai dengan keahlian serta deskripsi tugas secara jelas.

b. Mitigasi Bencana: Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1, ayat 9 mendefinisikan mitigasi bencana sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*), maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*human-induced disaster*). Dalam penerapannya di Indonesia, mitigasi bencana lebih ditekankan ke arah manajemen kebencanaan, yaitu pada saat dan setelah (pasca) terjadinya bencana. Sedangkan pada tahap sebelum (pra) bencana masih terbatas pada tahapan pencegahan/prevensi, yaitu dengan menghindari pemanfaatan kawasan yang rawan bencana untuk dikembangkan sebagai kawasan aktivitas. Selain itu, kebijakan nasional penanggulangan bencana yang ada masih mengandung beberapa kelemahan, yaitu dalam hal tingkat implementasi ke segala lapisan masyarakat di Indonesia yang mempunyai kondisi sosio-ekonomi beragam. Akibatnya, masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan secara memadai tentang kebencanaan akan sangat rentan ketika menghadapi bencana, dan tidak mempunyai kemampuan adaptasi untuk pulih kembali pada saat pasca bencana. Masyarakat daerah rawan bencana mempunyai risiko tinggi terhadap ancaman bencana, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: dekat dengan sumber bencana, pengetahuan tentang kebencanaan rendah, tingkat kesadaran rendah, kemiskinan, pendidikan rendah, penggunaan teknologi terbatas, sarana mobilitas rendah, usia non produktif tinggi, beban tanggungan tinggi, kualitas bangunan rendah, sistem informasi

terbatas, dan kualitas lingkungan rendah (Enok, 2008).

c. Pemetaan dan Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Bencana Alam: Dalam melakukan pemetaan dan karakterisasi sumber daya alam sebagai salah satu elemen sistem pendukung keputusan (*decision support system*), BGR (*German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources*) juga memberikan sosialisasi tahapan pra-bencana kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan masyarakat (*communities preparedness and resilience*) terhadap potensi bencana dalam jangka pendek dan panjang. Materi sosialisasi atau pembekalan kepada masyarakat yang diberikan adalah bahan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat, dan menarik perhatian. Materi tersebut dapat berupa 'safety rules' dalam menghadapi bahaya gempa bumi dan tsunami, siswa sekolah dasar diberikan buku bimbingan, poster kartun praktis inisiatif konco cilik (pengenalan bencana pada anak), dan sistematis dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Selain itu dapat berupa interaksi langsung dengan masyarakat, penguatan kelembagaan baik pemerintah dan masyarakat, merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana.

Upaya lainnya dalam penguatan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pra-bencana dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan kepada aparatnya, yaitu mencakup pemahaman mengenai kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha *preventif* kebencanaan. Selain itu, juga memberikan pelatihan menggunakan berbagai perangkat sistem peringatan dini berbasis komputasi dan elektronik, dimana dibekali dengan kemampuan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait antar daerah maupun tingkat nasional. Dengan demikian, setiap daerah akan memiliki rencana penanggulangan bencana

sebagai potensi yang ada di wilayahnya. Dalam tahapan selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keahliannya secara bersinergi dengan masyarakat luas.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagai upaya pengurangan resiko bencana, merupakan salah satu faktor tingginya resiko bencana. Korban bencana yang besar (jiwa dan harta benda) dan kerusakan lingkungan seringkali diakibatkan oleh kelengahan dalam mengantisipasi datangnya bencana, upaya antisipasi mitigasi dan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Dalam rangka membangun sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana, terkait erat dengan ketersediaan potensi dan sumber daya yang dimiliki, personal yang terlatih, sistem bantuan darurat, perawatan evakuasi, dan sistem jaringan komunikasi yang dapat didayagunakan ketika terjadi bencana. Peningkatan pengetahuan tentang kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan di daerah rawan bencana.

Masyarakat juga perlu disiapkan dengan pemberian pengetahuan mengenai kebencanaan agar memiliki pengetahuan yang benar, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, serta tanggap ketika terjadi bencana. Penanggulangan bencana maupun dampaknya harus dilakukan secara terkoordinatif dan terpadu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pemerintah telah membentuk wadah koordinasi nasional dalam penanggulangan bencana, yakni Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomer 3 Tahun 2001, jo Nomer 11 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 46 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan mendasarkan pada asas gotong royong (kerjasama semua pihak) dan dilandasi dengan rasa sukarela tanpa paksaan dari semua unsur yang terkait. Oleh karena itu, dalam penanggulangan bencana harus dilakukan pada semua sektor secara terkoordinasi dan terintegrasi, dimana didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling menunjang dan diharapkan dapat diatasi oleh masyarakat secara swadaya, dan tidak terlalu menggantungkan pada bantuan dari pihak luar. Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran sesuai tuntutan keadaan yang serba darurat, dilakukan dengan prioritas utama yang menyangkut penyelamatan jiwa, serta lebih menitikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yakni kesiapsiagaan yang meliputi pencegahan dan pengurangan dampak resiko bencana. Pada dasarnya, terjadinya bencana tidak mengenal batas wilayah, oleh karena itu upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan menggunakan kemampuan dan potensi seluruh wilayah maupun di luar wilayah bencana.

2. Saat Tanggap Darurat (ketika terjadi bencana)

Penanganan darurat merupakan tindakan yang diambil sesegara mungkin sesudah terjadinya bencana. Tindakan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda, serta menagani kehancuran dan kerusakan dampak bencana. Prioritas penanganan dalam tahap tangggap darurat meliputi,

penyelamatan korban dan penanganan luka-luka, pengaktifan tim tanggap darurat (satlak), pembentukan pusat-pusat layanan (posko), distribusi *supplies* (logistik, tenda dll), dan penyediaan hunian sementara.

3. Pascabencana

Pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan suatu proses untuk membantu masyarakat yang terkena bencana agar mampu melaksanakan fungsinya kembali dengan baik. Kegiatan rehabilitasi antara lain mencakup: Pemulihan pelayanan-pelayanan utama di dalam masyarakat, pemugaran rumah dan bangunan yang masih dapat diperbaiki, penyediaan rumah sementara, pemberian bantuan rehabilitasi fisik dan psikologis, penggantian bangunan dan infrastruktur yang hancur (peletakan dasar bagi tindakan rekonstruksi).

Rekonstruksi merupakan komponen penanggulangan bencana yang menghubungkan semua kegiatan penanggulangan bencana dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Pada umumnya timbulnya korban jiwa dan kerusakan yang besar disebabkan karena kelengahan dalam mengantisipasi datangnya bencana, berbagai upaya antisipasi, mitigasi dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana masih rendah. Paradigma penanggulangan bencana saat ini harus berubah dari *fatalistik responsif* ke arah *preventif proaktif*, yaitu dari pendekatan kedaruratan menjadi kesiapsiagaan. Segala aspek dan proses penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada aspek sebelum bencana terjadi, agar setiap waktu masyarakat siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai pihak yang berkompeten dalam penanggulangan korban bencana, khususnya Direktorat Bidang Bantuan Sosial telah membangun suatu sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana, antara lain: Ketersediaan potensi dan sumber daya yang dimiliki, seperti: personal yang terlatih, sistem bantuan darurat peralatan

evakuasi, sistem jaringan komunikasi, mekanisme kerja, dan lain sebagainya yang siap didayagunakan ketika terjadi bencana. Sosialisasi, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana serta pelatihan Taruhan Siaga Bencana (Tagana), merupakan salah satu kunci dalam rangka pengurangan resiko bencana. Kehadiran Tagana di tengah-tengah masyarakat dalam setiap kejadian bencana mempunyai kontribusi yang sangat positif, dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan Tagana dan yang sejenisnya penting dilakukan di daerah rawan bencana. Melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat guna meminimalisir resiko bencana, maka pada saat terjadi bencana diharapkan tidak ada korban yang menderita, terlantar ataupun tidak terlindungi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk keberhasilan penanggulangan bencana yang secara terus-menerus harus dipelihara dan ditingkatkan.

4. Tahapan Bantuan terhadap Korban Bencana

Korban bencana alam memerlukan bantuan dari berbagai organisasi, masyarakat, pemerintah dan lembaga atau negara asing. Dalam pemberian bantuan dapat dilakukan melalui beberapa tahap yang berbeda. Menurut Helssloot dan Reuitenber (2004) tahapan bencana dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap peringatan, tahap gawat darurat (tindakan pertolongan, bantuan medis, rumah sementara), dan tahapan pemulihan atau pembangunan kembali. Wolenksy (1990) membagi tahapan pemberian bantuan bencana alam menjadi empat tahapan yaitu tahap sebelum bencana (*mitigation and preparedness planning*), tahap tanggap darurat (*immediate pre and post impact*), tahap pemulihan jangka dekat (dua tahun) tahap pemulihan jangka panjang (10 tahun). Kiefer Monttjoy, mengutip dari Waugh (2000) membagi tahapan bantuan terhadap korban bencana alam dalam empat tahap, yaitu tahapan peringatan, (*prevention*),

perencanaan dan persiapan (*planning and preparedness*), tanggapan (*response*), dan pemulihan (*recovery*) (Sunit Agus TC: 2011). Kegiatan manajemen bencana dalam memberikan bantuan kepada korban bencana mempunyai tujuan 1) mencegah kehilangan jiwa, 2) mengurangi penderitaan manusia, 3) memberi informasi kepada masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai resiko bencana, 4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber daya ekonomi (Hadi Purnomo dan Roni S, 2010)

C. Penggunaan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan distribusi bantuan bagi korban bencana alam yang ada di alam empirik. Penentuan lokasi penelitian dengan *purposive*, yaitu berdasarkan tingkat keseringan terjadinya bencana alam, seperti: gempa bumi, banjir, dan tsunami sehingga lokasi penelitian dipilih Kota Jayapura. Sumber data berasal dari (a) Informasi yang diberikan oleh orang yang mengetahui dan menjadi pelaku langsung distribusi bantuan bagi korban bencana, dan (b) Informasi yang diberikan oleh korban langsung dari bencana alam yang terjadi di lingkungan mereka. Pemilihan Informan-kunci dan Informan menggunakan teknik *purposive*, dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang mengetahui kejadian bencana alam dan memiliki kompetensi, baik secara formal maupun informal dalam penanganan korban bencana alam di lingkungannya, yaitu aparat dari Dinas Sosial Kota Jayapura. Pengumpulan data dilakukan antara lain dengan menggunakan teknik wawancara melalui panduan wawancara sebagai *guide line*, yaitu ditujukan kepada orang yang mengetahui secara nyata perihal pendistribusian bantuan seperti: aparat Dinas Sosial Kota Jayapura, BPBD Kota Jayapura, Distrik Kota Jayapura, dan korban bencana. Di samping wawancara, juga menggunakan teknik observasi langsung kepada korban bencana alam, telaah dokumen terutama yang menyangkut peta bencana, distribusi bantuan,

serta kuantitas korban dalam berbagai gradasi kerugian. Selain itu, pengumpulan data juga menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD), dengan peserta dari aparat Dinas Sosial Kota tiga orang, kecamatan dua orang, kelurahan lima orang, BPBD dua orang, Tagana tiga orang, TKSK satu orang, Karang Taruna dua orang, PSM tiga orang, dan instansi terkait dalam penyaluran bantuan sosial bencana alam sebanyak dua orang. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif terhadap distribusi bantuan bagi korban bencana alam di ranah empirik.

D. Realisasi Penanggulangan Bencana Alam di Kota Jayapura

Kondisi Kependudukan Wilayah Kota Jayapura secara geografis terletak di bagian Barat pada 137° 27' Bujur Timur, bagian Timur pada 141° 41' Bujur Timur, bagian Utara pada 1° 27' Lintang Selatan, dan bagian selatan pada 3° 49' Lintang Selatan. Batas wilayah Kota Jayapura sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah selatan dengan Distrik Arso Kabupaten Keerom, bagian timur dengan Negara Papua New Guinea dan sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Kota Jayapura memiliki luas wilayah 940 km² yang terbagi menjadi lima kecamatan/distrik yaitu meliputi: Abepura, Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Muara Tami, dan Heram. Nama Kota Jayapura pada awalnya adalah Holandia, dimana nama tersebut diberikan oleh Kapten Sachse pada tanggal 7 Maret 1910. Hol diartikan sebagai lengkung teluk dan land diartikan tanah, dengan demikian nama Holandia diartikan sebagai tempat yang berteluk. Negeri Belanda atau Holand yang geografisnya menunjukkan keadaan berteluk-teluk. Topografi daerah ini cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, rawa-rawa, dan hutan lindung dengan kemiringan 40 persen bersifat konservasi dan herupa hutan lindung sehingga sebesar 30 persen wilayahnya tidak layak huni. Variasi curah hujan berada antara 45-255 mm per tahun dengan jumlah hari

hujan rata-rata bervariasi antara 148-175 hari hujan per tahun. Suhu udara rata-rata 29–31 derajat celsius, musim hujan dan kemarau tidak teratur dalam arti kadang-kadang panas namun kemudian turun hujan. Penduduk Kota Jayapura adalah penduduk heterogen yang terdiri dari bermacam-macam yang ada di Indonesia. Jumlah total penduduk kota Jayapura menurut sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 256.705 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Jayapura yakni sebanyak 278 jiwa per kilometer.

Kota Jayapura yang begitu elok dan indah merupakan daerah rawan bencana alam, kondisi wilayah geografis yang berbukit-bukit dan berada dibibir pantai serta berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik Utara memungkinkan timbulnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan tsunami. Beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi pada dua tahun terakhir adalah dampak akibat gempa bumi dan tsunami di Jepang yang terjadi di daerah pinggiran pantai Kota Jayapura pada tahun 2011 memakan korban jiwa satu orang. Bencana banjir yang terjadi di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram pada pebruari 2012 menimbulkan kerusakan tempat tinggal dan tempat jualan, sedang kejadian tanah longsor juga terjadi pada distrik Jayapura Utara. Dari hasil wawancara dengan *key informant* dan *informant*, bahwa ada beberapa titik kerusakan akibat dampak tsunami Jepang di Kota Jayapura, di antaranya:

1. Distrik Muara Tami (Kampung Holtekam)

Sesuai dengan keterangan informan warga yang bermukim di sekitar Pantai Holtekam, bahwa bencana tsunami terjadi pada pukul 23.30 sampai dengan 00.30 WIT telah memporakporandakan fasilitas atau infrastruktur berupa sebuah jembatan putus yaitu jembatan Kali Buaya, dimana pada tiang penyangga jembatan amblas sehingga membentuk kerucut pada tengah jembatan. Jembatan tersebut belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, sehingga harus memutar kembali dan baru dapat dipakai oleh kendaraan roda dua. Kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter pada sisi jembatan Kali Buaya yang mengalami kerusakan aspal (mengelupas)

karena terkena terjangan air laut. Kerusakan rumah penduduk, sebanyak 19, tiga rumah rata dengan tanah dan tanpa bekas dihempaskan badai tsunami yang membuat tiga belas jiwa tidak dapat berteduh, dan tiga rumah pariwisata rusak berat. Kerusakan lain adalah alat tangkap ikan, yaitu perahu yang setiap harinya dipakai untuk mencari ikan maupun untuk keperluan lain. Sedangkan yang mengalami kerusakan berat sebanyak 38 buah perahu, dimana sebagian besar terdampar kurang lebih 150 meter dari bibir pantai. Jaring yang setiap malam oleh para nelayan di kampung Holtekam ini selalu dipasang untuk menangkap ikan, jumlah keseluruhan sebanyak 129 jaring dari berbagai ukuran, mata jaring ikut terhempas oleh tsunami. Di samping itu, tambak ikan dan udang yang ada di wilayah Pantai Holtekam juga mengalami kerusakan parah. Areal tambak ikan dan udang seluas kurang lebih 10 hektar mengalami rusak berat diterjang tsunami, dan semua ikan yang ada dalam tambak hanyut terbawa air. Selain itu, sebanyak dua buah kantor Koperasi Unit Desa (KUD) mengalami kerusakan berat.

2. Distrik Abepura

Rumah penduduk yang mengalami rusak berat sebanyak 7 buah, dengan jenis kerusakan antara lain hilangnya dapur rumah beserta papan, rumah mengalami kemiringan yang sewaktu-waktu dapat roboh. Rumah rusak ringan sebanyak 3 buah, dengan jenis kerusakan terutama terjadi pada teras rumah, yaitu mengalami kerusakan maupun hilangnya papan teras. Fasilitas umum berupa rumah adat, yaitu rumah yang dibangun secara bergotong-royong dan dilakukan secara bersama-sama oleh warga kampung secara swadaya masyarakat. Rumah adat ini biasa dipergunakan untuk kepentingan warga kampung, seperti: rapat, arisan, untuk menerima para tamu dari luar, dan untuk pentas kesenian. Kerusakan bangunan tersebut sekarang tinggal lantainya saja, sedangkan atapnya maupun tiangnya hanyut terbawa air laut. Jalan kampung, yaitu terdapat dua jalan kampung yang menghubungkan Kampung Enggros dan Kampung Metu Debby mengalami kerusakan berat atau putus, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Apabila warga

kampung hendak menghubungi kampung lain, maka harus ditempuh dengan menggunakan perahu kecil yang biasa dipakai untuk mencari ikan. Setelah satu tahun lebih dari saat kejadian tsunami, ternyata baru dilakukan perbaikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh warga kampung. Alat penyeberangan berupa sebuah *speed boat* 2 mesin dan dua unit motor hilang dihempas tsunami. Alat penerangan, yaitu dua buah genset yang biasa dipergunakan untuk penerangan rumah juga hilang. Keramba ikan, yaitu tempat untuk memelihara ikan dengan cara membentangkan jaring agar ikan tidak keluar, kurang lebih sebanyak 24 keramba ikan hanyut tanpa bekas.

3. Distrik Jayapura Selatan

Terdapat empat kampung atau kelurahan yang terkena dampak tsunami, namun kondisinya tidak separah dengan distrik yang lain. Adapun ke empat kampung atau kelurahan tersebut meliputi: Kelurahan Hamadi, meliputi Pantai Hamadi terdapat kotoran sampah yang berserakan dan timbunan pasir. Serakan sampah itu antara lain meliputi kayu atau papan, dedaunan, dan patahan bambu; Kelurahan Argapura, kondisi daerah ini hanya terdapat tumpukan sampah yang berserakan dan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti; Kampung Kayu Pulau, daerah ini tidak ada dampak yang begitu berarti akibat dari pasang air laut; Kampung Tobati, kondisi Kampung Tobati tidak separah jika dibandingkan dengan daerah di Holtekam, yaitu hanya terdiri dari tiga rumah warga yang mengalami rusak berat, dan sebanyak 14 rumah rusak ringan. Sedangkan sarana umum yang mengalami kerusakan, yaitu dua buah jalan jembatan yang menghubungkan antar rumah mengalami rusak berat atau putus, sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang dengan besaran 8,9 skala richter pada tanggal 11 Maret 2011 pada pukul 16.00 WIT, dan menerjang di wilayah perairan Kota Jayapura sekitar jam 23.30 sampai dengan 00.30 WIT, berakibat pada porak-porandanya bangunan infrastruktur, rumah penduduk, dan fasilitas umum. Korban sebagian besar luka ringan dan korban jiwa yang meninggal akibat tsunami

tersebut sebanyak satu orang.

Keputusan Menteri Sosial Nomer 80 Tahun 2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Perihal Indikator Kinerja Penanggulangan Bencana, di antaranya adalah terbangunnya sistem jaringan penanggulangan bencana bidang bantuan sosial korban bencana yang meliputi sistem jaringan kerja, logistik, komunikasi, personil, transportasi, dan posko bencana berbasis masyarakat. Dalam upaya penanggulangan bencana, ke enam sistem jaringan saling berkaitan dan berkoordinasi, walaupun masing-masing jaringan kerja juga mempunyai kewenangan sendiri-sendiri.

Dalam penanganan bencana yang terjadi di Jayapura akibat gempa tsunami di Jepang, dilakukan oleh personil yang ada di instansi Kota Jayapura melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, yaitu mengambil langkah dengan memerintahkan dan menempatkan personil pada wilayah rawan bencana, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada di wilayah Kota Jayapura. Dengan diketahuinya hasil pemantauan dan koordinasi yang dilakukan, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana membentuk tiga tim sesuai perintah Sekretaris Daerah Kota Jayapura selaku Kepala Exofisio Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu untuk melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya pada tiga titik yang terkena dampak bencana tsunami.

Instansi yang tergabung dalam jaringan personil antara lain meliputi Dinas Sosial Kota, Kodim/TNI, Dinas Kesehatan Kota, Tagana, Polsek, Distrik, dan kelurahan atau kampung yang bersangkutan. Tugas dan kewenangan setiap instansi berdasarkan kompetensinya masing-masing, antara lain: Dinas Sosial Kota menyiapkan tenaga untuk menyalurkan bantuan seperti sembako, pakaian, kebutuhan mandi, masak, dan sebagainya, Kodim/ TNI menyiapkan tenaga untuk kegiatan evakuasi. Dinas Kesehatan Kota menyiapkan tenaga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat-obatan, Tagana menyiapkan

tenaga untuk: (a) Melaksanakan pendataan korban (b) Menyediakan dan mengelola sebuah dapur umum lapangan untuk kebutuhan para korban, khususnya kebutuhan makanan dan minuman dengan mempertimbangkan potensi atau ketersediaan bahan pokok pada situasi darurat yang ada pada daerah bencana, Polsek menyiapkan tenaga untuk melakukan tindakan pengamanan dan ketertiban di daerah bencana, Distrik menyiapkan pemetaan data, penyaluran bantuan, dan kelurahan atau kampung menyiapkan tenaga sukarela yang dapat membantu penyaluran bantuan bencana.

Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh informan, bahwa personil yang terlibat dalam penanggulangan bencana meliputi instansi yang terkait, seperti: Dinas sosial Kota Jayapura, Dinas Kesehatan, Kodim/TNI, Polri (Polsek), Tagana, Distrik, kelurahan dan lembaga lain (PMI), masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Mereka di bawah komando Sekertaris Daerah Kota Jayapura. Dalam pelaksanaan kegiatan, mereka saling membantu agar segera tertanganinya korban. Di samping itu, keterlibatan masyarakat cukup membantu dalam upaya mengurangi korban lebih banyak.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menanggulangi bencana beberapa SKPD melakukan jaringan kerja. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa informan, bahwa jaringan kerja oleh masing-masing personil sudah dilakukan, mereka saling isi mengisi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam memberikan bantuanpun pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan kondisi dan kewenangan yang ada. Walaupun masih ada sedikit kekurangan penanganan karena kondisi wilayah bencana sulit dijangkau, sehingga korban ataupun bantuan untuk mengganti dan membangun kerusakan akibat bencana belum dapat cepat tertangani. Instansi yang tergabung dalam jaringan kerja meliputi Dinas Sosial Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kodim, Polisi, Tagana, SAR, dan para sukarelawan. Masing-masing SKPD melakukan tugas dan kewenangan berdasarkan kompetensinya

masing-masing, antara lain. Dinas Sosial Kota melakukan kegiatan berupa: Mencari dana bantuan; Pengepakan dan menggolong-golongkan jenis bantuan; Pendistribusian bantuan. BPBD Kota melakukan kegiatan berupa: Mengkoordinir bantuan; Mengkoordinir Tagana dan tenaga sukarelawan. Dinas Kesehatan Kota melakukan kegiatan berupa: Pertolongan dan pemeriksaan kesehatan para korban tsunami baik oleh dokter maupun tenaga medis lain; Pembagian obat-obatan bagi para korban. Kodim melakukan kegiatan berupa: Evakuasi korban ke daerah yang lebih aman; Pengaturan jalannya evakuasi. Polisi melakukan kegiatan berupa: Mengkondisikan aman dan stabil di daerah bencana; Mengatur lalulintas di daerah bencana. Tagana melakukan kegiatan untuk: Pencarian korban; Penanganan pengungsi; Penanganan korban luka baik berat maupun luka ringan; Penanganan korban yang meninggal. SAR melakukan kegiatan membantu pelaksanaan evakuasi dan pencarian korban yang belum ditemukan. Sukarelawan melakukan tugas berupa membantu proses evakuasi, pencarian korban bencana, dan membantu penyaluran bantuan.

Dalam setiap terjadi bencana alam yang memerlukan penanganan yang cepat dan akurat dapat mengurangi timbulnya korban jiwa yang semakin banyak, maka ketersediaan dan pemberian logistik sangat diperlukan. Dari informan diperoleh penjelasan bahwa beberapa instansi yang tergabung dalam jaringan logistik antara lain Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan Kota, Tagana, Distrik/Kecamatan, dan Kelurahan. Masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri berdasarkan kompetensinya, antara lain Dinas Sosial Kota bertugas untuk: Penyediaan bantuan berupa sembako (beras, kecap, sarden, gula, dan telur), jatah hidup selama tiga hari (masa darurat), pakaian, Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang dapat berupa papan, seng, dan semen; Pendistribusian bantuan. Dinas Kesehatan Kota bertugas untuk: Penyediaan tenaga medis baik dokter maupun perawat; Penyediaan obat-obatan yang banyak dibutuhkan oleh para korban. Tagana bertugas untuk menyediakan segala

sesuatu yang dibutuhkan dalam penanganan sebuah bencana, baik bagi korban ataupun bagi kebutuhan petugas yang menangani bencana. Distrik bertugas untuk menyediakan tempat sebagai sekretariat posko yang dipandang paling strategis baik dalam penanganan korban maupun penyaluran bantuan. Kelurahan atau kampung bertugas untuk mendata bagi para korban yang akan memperoleh bantuan, serta melakukan pendistribusian bantuan. Logistik yang ada di dalam keadaan bencana diperoleh dari beberapa sumber, antara lain dari sumbangan masyarakat, swasta dan organisasi-organisasi sosial yang peduli terhadap bencana alam, Dinas Sosial Kota dan apabila tidak mencukupi akan meminta tambahan ke Dinas Sosial Propinsi/ Kementerian Sosial.

Penanganan bencana akan tercapai dengan baik apabila tersedianya alat transportasi dan dapat dipergunakan untuk menjangkau tempat bencana yang sulit. Instansi yang tergabung dalam jaringan transportasi memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan kompetensinya masing-masing, antara lain: Dinas Sosial Kota bertugas menyediakan alat transportasi baik darat maupun air yang dimiliki untuk penyaluran bantuan maupun kegiatan evakuasi bagi para korban. Dinas Perhubungan Kota bertugas untuk penyediaan alat transportasi darat maupun air serta memperbaiki infrastruktur perhubungan yang rusak. Tagana mempunyai tugas menyediakan kebutuhan alat transportasi baik roda empat maupun roda dua untuk keperluan penanganan korban bencana serta untuk keperluan pengangkutan logistik.

Komunikasi merupakan uratnadi untuk tercapainya penanganan bencana yang dapat berjalan dengan baik dan sukses. Komunikasi dari masing-masing instansi akan dapat memperingan dan lebih cepatnya penanganan korban bencana alam. Lembaga yang tergabung dalam jaringan komunikasi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang akan saling membantu agar tercapai tujuan dalam penanganan bencana alam. Lembaga tersebut antara lain, BMKG Pusat bertugas menginformasikan tentang peringatan dini terhadap potensi bencana (tsunami) kepada BPBD provinsi yang harus segera

ditindaklanjuti. BPBD Provinsi bertugas memberi informasi tentang peringatan dini terhadap potensi bencana berupa tsunami yang harus segera ditindaklanjuti oleh BPBD Kota. BPBD Kota Jayapura melalui media TV lokal (Top TV) maupun media elektronik lain seperti radio melakukan himbuan kepada masyarakat Kota Jayapura yang bermukim di sepanjang pesisir pantai untuk tidak panik dan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya tsunami. Dengan adanya peringatan dini tersebut maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura langsung mengambil langkah dengan memerintahkan dan menempatkan personil pada wilayah rawan bencana serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada di wilayah Kota Jayapura. Orari setempat bertugas menyebarkan peringatan dini tsunami tersebut kepada warga yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.

Posko atau pusat komando merupakan tempat sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah korban bencana alam yang paling bawah dan dekat dengan lokasi bencana. Dengan posko ini diharapkan penanganan akan terorganisir dan tertangani dengan baik. Instansi yang tergabung dalam jaringan posko yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan kompetensinya masing-masing, antara lain: Dinas Sosial Kota bersama BPBD Kota bertugas untuk menyediakan bantuan baik secara kuantitas maupun dalam menentukan jenis bantuan, penyediaan data calon penerima bantuan, dan pendistribusian bantuan. Tagana bertugas melaksanakan monitor atau pemantauan, dan menginformasikan data-data dengan mengkoordinir tim yang lain. Distrik bertugas untuk menyediakan tempat sebagai sekretariat posko yang dipandang paling strategis baik dalam penanganan korban maupun penyaluran bantuan. Kelurahan atau kampung bertugas untuk menginformasikan kepada warganya yang memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Sukarelawan bertugas untuk membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan bencana baik yang berupa pra bencana, saat bencana, maupun pasca

bencana. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan dapat berupa kegiatan evakuasi korban maupun dalam kegiatan penyaluran bantuan.

E. Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Prosedur dalam pemberian bantuan dilakukan terlebih dahulu melalui pendataan yang dilakukan oleh aparat kelurahan, dimana para korban didata oleh petugas dari kelurahan melalui perangkat RT atau RW yaitu siapa saja yang menjadi korban, selanjutnya data disampaikan ke kecamatan untuk dimintakan bantuan ke Dinas Sosial atau SKPD yang terkait. Dinas Sosial atau SKPD akan memberikan bantuan kepada korban sesuai dengan permintaan dan stok yang ada. Apabila persediaan bantuan tidak mencukupi, maka akan meminta ke instansi di provinsi ataupun ke pemerintah pusat. Dalam pemberian bantuan kadang tidak sesuai dengan permintaan, sehingga para korban sedikit kecewa. Setelah bantuan datangpun pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah korban, melainkan mereka meminta dibagi keseluruhan warga, walaupun mereka tidak menjadi korban bencana. Adapun jenis bantuan yang diberikan antara lain meliputi kebutuhan hidup sehari-hari (makanan, minuman, dan pakaian), sembako (walaupun tidak semua tercukupi), pelayanan kesehatan, rehabilitasi tempat tinggal, rehabilitasi lingkungan, dan rehabilitasi kerja ataupun usaha.

Bantuan yang berupa uang maupun barang dapat disalurkan langsung kepada korban bencana ataupun dapat dilakukan melalui posko, dinas sosial maupun BPBD. Sumbangan yang berupa uang disalurkan melalui posko, Dinas Sosial maupun BPBD wajib disetorkan ke rekening BPBD. Sedangkan sumbangan yang berupa barang dapat langsung didistribusikan oleh penerima (posko, Dinas Sosial maupun BPBD) kepada korban bencana baik yang ada di penampungan sementara maupun di daerah bencana.

F. Fakta dan Idealisasi Penyaluran Bantuan Sosial Kota Jayapura

Dalam proses penyaluran bantuan sosial bencana alam ada beberapa pihak yang secara langsung terlibat, antara lain: sebagian besar aparat/pegawai dinas sosial kabupaten, masyarakat setempat, dan para sukarelawan. Para sukarelawan ini perlu diberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena mereka bekerja tanpa pamrih, meninggalkan keluarga/saudara, dan bekerja tidak mengenal waktu, padahal mereka juga harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Dalam hal ini pihak SKPD setempat berinisiatif akan memberikan uang lumpsum kepada para sukarelawan yang bekerja sampai sore atau bahkan sampai malam hari. Selain itu bantuan yang datang dari pusat harus melalui BPBD provinsi terlebih dahulu yang dirasa masih bersifat birokratis, sehingga memperlambat proses penyaluran bantuan. Guna memudahkan penyaluran bantuan berjalan lebih efektif dan cepat sampai kepada sasaran (korban bencana) lebih baik apabila bantuan yang datang dari pusat langsung diberikan kepada BPBD kota atau daerah yang mendekati lokasi rawan bencana alam, sehingga korban yang sangat membutuhkan bantuan cepat dapat tertangani.

Dalam pemberian bantuan kepada korban bencana masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya bantuan yang diberikan belum semua mencukupi dari kebutuhan yang ada. Misalnya ada beberapa warga yang mendapatkan bantuan peralatan yang kurang sesuai dengan kondisi mereka, bantuan peralatan rumah tangga yang belum semua menerima dan tepat. Disamping itu kondisi daerah yang sangat sulit memungkinkan bantuan yang diberikan tidak sampai ke semua korban bencana yang tepat waktu. Untuk mengatasi kekurangan pemenuhan kebutuhan bagi sasaran atau korban bencana. Beberapa SKPD melakukan koordinasi yang cukup baik.

G. Rangkuman

Dalam penyaluran bantuan bencana di Kota Jayapura dapat dikatakan cukup terpenuhi dan berjalan dengan lancar. Adapun penyaluran bantuan korban bencana alam tsunami di Kota Jayapura antara lain meliputi:

1. Bantuan kebutuhan kehidupan korban bencana yang berupa makanan, minuman, dan sandang. Di samping itu mereka juga memperoleh bantuan yang berupa sembako yang sangat mereka butuhkan untuk mempertahankan hidup seperti: beras, minyak, telur, sarden, garam, susu, kecap, mie, dan lauk. Agar mereka dapat mengolah makanan dan minuman tersebut, maka juga dibantu peralatan dapur seperti: ceret, wajan, panci, termos, dan lain sebagainya. Dalam penyaluran bantuan korban ini tidak hanya bagi para korban saja, namun diperuntukan bagi seluruh warga kampung korban yang bersangkutan secara merata, sehingga tanpa perkecualian baik bagi korban maupun bukan korban, karena kalau tidak dapat menimbulkan rasa irihati pada sesama warga kampung.
2. Diberi pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan para korban bencana baik yang dilakukan oleh para dokter maupun tenaga medis lainnya (perawat), dan pemberian obat-obatan secara gratis.
3. Rehabilitasi tempat tinggal, yaitu diberi bantuan berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang berupa papan atau kayu, seng, dan semen. Jenis bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan korban yang mengalami kerusakan baik berkategori berat maupun ringan.
4. Rehabilitasi lingkungan, yaitu melalui perbaikan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang dapat mengurangi resiko bencana alam di kemudian hari. Bantuan yang diberikan berupa bahan untuk memperbaiki jalan antar kampung yang berupa papan atau kayu dan semen yang dikerjakan secara gotongroyong seluruh warga kampung.

5. Rehabilitasi kerja dan usaha, yaitu jenis bantuan yang diberikan berupa alat jaring dan keramba ikan yang dapat dipakai sebagai usaha untuk menghidupkan kembali matapencaharian mereka sebagai nelayan. Sedangkan bagi mereka yang kehilangan berupa perahu, sampai saat ini belum memperoleh gantinya karena minimnya bantuan yang ada, padahal perahu merupakan alat satu-satunya bagi para nelayan untuk mencari ikan sebagai penopang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Penyaluran bantuan korban bencana dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah terjalin cukup solid, baik: pihak BPBD provinsi maupun kota, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan Kota, Kodim, Kepolisian, Tagana, Distrik, kelurahan maupun para sukarelawan. Sedangkan sebagai faktor penghambat dalam proses penyaluran bantuan korban bencana terutama mengenai kondisi medan bencana. Wilayah bencana tsunami di Kota Jayapura merupakan daerah yang sulit dijangkau, karena harus menggunakan sarana transportasi (darat dan air/laut) secara memadai, padahal sarana yang tersedia sangat terbatas sehingga penyaluran bantuan sosial bencana alam terlambat sampai kepada korban bencana.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, maka disarankan agar sarana transportasi (baik darat maupun laut/air) dapat tercukupi secara memadai. Beberapa daerah rawan bencana di Kota Jayapura sebagian besar merupakan daerah yang sulit dijangkau, baik melalui darat maupun air/laut karena banyak diliputi pegunungan, tebing yang suram, teluk, dan rawa-rawa. Di samping itu, disarankan pula mengenai pemenuhan kebutuhan kehidupan korban bencana alam tsunami yang berupa rehabilitasi kerja dan usaha dapat terealisasi. Mengingat bahwa peralatan untuk menopang kehidupan mereka seperti: alat jaring, keramba ikan, dan perahu sangat diperlukan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali matapencahariannya.

Pustaka Acuan

- Abdul Syahni. 1994. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alvin L Bertrand. 1980. *Sosiologi (Terjemahan Sanapiah S. F)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ankie M.M. Hoogvelt. 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang* (disadur oleh: Alimandan). Jakarta: Rajawali.
- Dasuki, 2008, *Upaya-upaya Ketahanan Sosial terhadap Bencana Alam Melalui Peningkatan Peran Organisasi Sosial Lokal, Media Informasi Tanggap*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. Departemen Sosial RI, Edisi April, 2008.
- Dwi Heru Sukoco. 2006. *Bencana dan Penanganannya*. Jakarta: Jurnal Pusdiklatkesos Vol. 1 No. 2 Juni 2006.
- Enok Maryani, Model Sosialisasi Mitigasi pada Masyarakat Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat, <http://www.google.co.id/search?q=Enok+maryani+dalam+model+mitigasi+bencana&hl=id&gbv=2&oq>
- Hadari Nawawi Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, 2010, *Manajemen Bencana Prespon dan Tindakan Terhadap Bencana*, Yogyakarta: Metpress.
- ISDR, 2004, Pengantar Manajemen penanggulangan Bencana. <http://www.google.co.id/search?q=Pengantar+Manajemen+penanggulangan+bencana&hl=id&gbv=2&gs>
- Keputusan Menteri Nomer 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP)
- Keputusan Menteri Sosial No. 80 Tahun 2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Moleong, 2002. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Pustaka Karya.
- Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- _____ Nomer 23 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Sunit Agus Tri Cahyono dan Abdul Hayat. 2011. *Penyebab dan Dampak Sosial Bencana Banjir Bandang di Wasior*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Suryopratomo. 2005. *Bencana Gempa dan Tsunami*. Jakarta: Kompas
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*
- Yean Paul Radrique. 2012. *Transportations Disaster*, New York: Hoftra University Department of Global Studies and Geografi